

Peran Pers Islam dalam Upaya Mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia

Alex Sobur

ABSTRAK

Peran pers dalam mendorong proses demokratisasi adalah hal yang mutlak. Namun, pers Indonesia, terutama pers Islam, bagaimanapun diharapkan berperan lebih aktif dalam mendudukkan reformasi dalam maknanya yang tepat, sambil tetap mencatat dan melaporkan sejumlah bahaya yang bisa membelokkan transisi demokrasi yang sedang berlangsung sekarang ini. Namun, ironisnya di negara yang penduduknya mayoritas Islam ini justru media pers lebih banyak didominasi oleh medis pers non-Islam. Lalu, bagaimana pers Islam bisa berperan di dalamnya? Dalam konteks ini, kehadiran pers Islam, atau pers yang Islami, yang maju dan bermutu, serta berdaya jangkau luas, mutlak dibutuhkan, agar ia bisa berperan dalam proses demokratisasi di Indonesia.

Pengantar

“Dunia Sambut Baik Yudhoyono,” demikian bunyi salah satu judul berita *Kompas* edisi Rabu, 6 Oktober 2004. Sementara, di hari yang sama, *Pikiran Rakyat* pun menulis, “George Bush Puji SBY.” Dua koran ini, setidaknya, mewakili “sambutan” dunia terhadap keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia.

Tahapan penting awal dari proses pembangunan demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan umum, seperti ditulis *Kompas* dalam “Tajuk Rencana”-nya, telah kita laksanakan bersama-sama secara baik. Bahkan sangat baik karena tidak ada kekerasan sama sekali yang mewarnai sehingga tidak ada setetes pun darah yang harus mengalir (*Kompas*, 5 Oktober 2004).

Maka itu, tidaklah berlebihan jika ucapan selamat kepada presiden terpilih Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono, bermunculan dari sejumlah kepala negara. Mereka, antara lain, Presiden China Hu Jintao, Perdana Menteri (PM) Denmark Anders Fogh Rasmussen, PM Inggris Tony Blair, dan PM Jepang Junichiro Koizumi.

Hal serupa disampaikan Presiden Jerman

Horst Koehler, Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun, dan PM Singapura BG Lee. Selain itu, ucapan selamat juga disampaikan Presiden Swiss Joseph Deiss, pejabat PM Belanda Gerrit Zalm, PM Malaysia Abdullah Badawi, PM Thailand Thaksin Shinawatra, dan Presiden Timor Timur Xanana Gusmao (*Kompas*, 6 Oktober 2004).

Tampaknya, salah satu isu paling populer di penghujung abad kedua puluh dan di awal milenium ketiga ini adalah soal demokratisasi. Lihat saja, misalnya, di antara indikator paling jelas dari kepopuleran tersebut adalah berlipat gandanya jumlah negara yang menganut sistem pemerintahan demokratis.

Sejak 1980-an, banyak negara di kawasan Eropa Selatan, Eropa Timur, Afrika, Amerika Latin, dan Asia, mengalami proses transisi ke demokrasi. Pemerintahan otoriter yang dipraktikkan di kawasan tersebut, sejak akhir 1950-an, satu demi satu mulai rontok. Meski tertatih-tatih—bahkan terancam gagal, Spanyol, Portugal, Yunani, Brazil, Argentina, Uruguay, Botswana, Afrika Selatan, Polandia, Hungaria, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Thailand, dan (akhirnya) Indonesia, menyambut proses transisi dengan antusiasme

yang patut dihargai. Sejumlah negara mengalami berbagai kesulitan cukup menonjol di dalam proses tersebut. Namun, ada pula yang berhasil—dan kini bisa dikategorikan ke dalam negara demokratis yang terkonsolidasikan, kuat, dan stabil.

Kini, tak satu pun negara berani “tampil beda” dengan—atau berpikir sedikit agak kritis tentang—demokrasi. Orang begitu takut untuk dibilang tidak demokratis. Dan, masing-masing berlomba, walau cuma pada tingkatan retorik, untuk menyebut pihaknya demokratis. Hanya segelintir pemimpin atau gerakan politik yang mengaku sebagai “anti-demokrasi”. Bahkan, belakangan ini di Brazil, ketika orang-orang mengusulkan perlunya suatu restorasi kerajaan, kalangan kerajaan sendiri tidak mendukung sistem kerajaan absolut dengan hak tak terbatas. Sebaliknya, kalangan kerajaan sendiri mengusulkan suatu “sistem kerajaan presidensial” yang serupa dengan kerajaan Spanyol sekarang (Sirry, 2002). Banyak orang sepakat bahwa perkembangan politik global yang terpenting pada akhir abad kedua puluh adalah munculnya gerakan prodemokrasi di seluruh belahan dunia dan keberhasilan gerakan itu di banyak negara.

Begitu gencarnya kampanye ihwal demokrasi berlangsung, sehingga muncul pandangan bahwa seluruh negara harus dikelola secara demokratis. Di situ ada kepercayaan kuat, kendatipun mungkin tidak dielaborasi dengan baik bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang universal, baik pada tataran ide maupun aplikasi.

Di tengah proses demokratisasi yang terjadi di mana-mana itu, pada mulanya dunia Islam tidak menjadi bagian di dalamnya. Ribuan halaman yang ditulis dalam koran-koran dan buku-buku mengenai transisi demokrasi yang terjadi di Amerika Latin, Eropa Selatan, Afrika, dan Asia, dengan sengaja sejumlah ahli tidak melibatkan dunia Islam (Effendy, 2002). Alasan awalnya ketika itu, akhir dasawarsa 1980-an, adalah kurangnya bahan. Namun, segera mereka tambahkan bahwa dunia Islam tidak mempunyai prospek untuk menjadi demokratis serta tidak mempunyai pengalaman demokrasi yang cukup.

Kalau kemudian, di tahun 2004, Indonesia ternyata bisa membuktikan bahwa negara yang

mayoritas berpenduduk Muslim ini sanggup menjalani proses demokratisasi melalui pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, tanpa pertumpahan darah, dan tanpa gejolak yang berarti, barulah mereka terkaget-kaget. “Kok, bisa ya,” mungkin begitu pikir mereka.

Pada dasarnya, memang banyak orang yang meragukan kesesuaian Islam dengan demokrasi. Laporan terbaru yang dikeluarkan *Freedom House*, Desember 2001, seperti dikutip Effendy (2002), menyebutkan bahwa di antara negara-negara yang ada di dunia, kawasan Islam, tidak ada yang masuk dalam kategori demokratis (dalam laporan ditulis “free”). Paling banter, di antara negara Islam ada yang masuk dalam kategori “partly free.” Dalam kategori ini, antara lain, disebut-sebut Banglades, Indonesia, Jordan, Kuwait, Maroko, Turki, dan Malaysia. Sementara Aljazair, Mesir, Libanon, Oman, Pakistan, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, Brunei, Iran, Qatar, Bahrain, Afghanistan, Irak, Lybia, Arab Saudi, Sudan, dan Syria masuk dalam kategori “not free”. Artinya, tidak demokratis.

Dari mana sesungguhnya demokrasi, khususnya di Indonesia itu datang? Sungguh sulit dijelaskan. Bahkan, para ilmuwan politik sekalipun, yang *notabene* banyak menggeluti teori-teori demokrasi dan demokratisasi kuno dan mutakhir, cuma bisa mengemukakan jawaban-jawaban yang sifatnya sangat spekulatif. Mereka seharusnya sudah bisa diandalkan untuk meramalkan apakah dan kapan Indonesia akan menjadi negara demokratis. Selama Orde Baru, termasuk tahap akhirnya pada tahun-tahun 1990-an, para ilmuwan politik tidak pernah percaya bahwa demokrasi sudah ada di ambang pintu. Ketika Presiden Soeharto ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa, mereka terkejut. Ketika beberapa hari kemudian Presiden Habibie membebaskan pers dan partai-partai politik, serta menjanjikan pemilihan umum yang betul-betul demokratis dalam jangka waktu satu tahun, mereka merasa lebih terkejut lagi.

Di Indonesia, demokratisasi (setidaknya untuk sementara ini) datang lebih awal daripada di Korea, dan lebih awal daripada ramalan para pengamat dan ilmuwan politik kita. Pemilihan umum yang demokratis, yang dijanjikan Presiden Habibie,

dilakukan pada 7 Juni 1999, kira-kira satu tahun setelah Presiden Soeharto *lengser*. Lima tahun kemudian, tepatnya 5 Juli dan 20 September 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden yang lebih demokratis lagi, sudah berlangsung dengan proses yang relatif aman, tertib, dan lancar. Kita tentu belum bisa menilai apakah sistem demokrasi yang untuk pertama kalinya ini akan bertahan lama atau tidak. Namun, untuk sementara waktu, yang terpenting adalah bahwa rakyat Indonesia, melalui pemilihan umum langsung itu, telah berhasil meletakkan batu demokrasi yang pertama.

Makna Reformasi, Peranan Pers, dan Pluralisasi Informasi

Sejak berakhirnya Orde Baru, mulailah terjadi perubahan-perubahan dramatis, termasuk berakhirnya “keharusan” bagi pegawai negeri sipil untuk menegakkan asas monoloyalitas pada Golongan Karya, berkembangnya komite yang mengelola gerakan massa, pembebasan tahanan politik, merebaknya kebebasan politik, dan berkembangnya kebebasan pers secara luar biasa. Hampir semua elemen kehidupan berbangsa dan bernegara mengalami perombakan. Dalam terminologi umum, proses perkembangan itulah yang biasa disebut “reformasi.”

Jadi, reformasi pada dasarnya merupakan proses perubahan atau perombakan sistem nilai dan tatanan lama yang dianggap keliru. Dalam kerangka ini, reformasi sebetulnya memiliki makna hakiki yang positif. Namun, dalam konteks transisi dari otoritarianisme di Indonesia, pemaknaan reformasi semacam itu mesti diimbui oleh sejumlah catatan kaki (Fatah, 2000).

Pertama, sudah terlampau lama sistem politik tidak mengakomodasi tuntutan-tuntutan perubahan yang sebetulnya berkembang di tengah masyarakat. *Kedua*, terlalu lama sebetulnya sistem politik Orde Baru menimbun masalah tanpa mencuil pemecahan-pemecahan konkret. Akibatnya, ketika kekuasaan berganti dan tuntutan reformasi menguak, yang kemudian tersedia adalah persoalan sosial politik yang menggunung. Reformasi pun berhadapan dengan serangkaian

pertanyaan pelik: dari mana perubahan-perubahan itu harus dimulai? Apa saja yang mesti diprioritaskan untuk diubah? Bagaimana menghadapi gelombang persoalan sosial-politik-ekonomi yang membutuhkan pemecahan segera? Pendeknya, reformasi adalah sebuah agenda kerja yang sangat pelik, rumit, alot, dan pasti memakan biaya sangat besar. *Ketiga*, proses reformasi terjadi sebagai sebuah pendadakan karena paksaan keadaan, bukan melalui proses sosial yang alamiah dan gradual. Hal ini menyebabkan proses reformasi harus dijalani tanpa ada kesiapan yang cukup dari para pelaku politik dan pemerintahan untuk membangun saling percaya dan membangun kesiapan guna melakukan kompromi-kompromi politik.

Di sinilah, saya kira, pers dituntut untuk menjelaskan seluruh persoalan itu. Pers Indonesia, termasuk pers Islam, bagaimanapun harus mencoba mendudukan reformasi dalam maknanya yang tepat sambil mencatat dan melaporkan sejumlah bahaya di dalamnya yang bisa membelokkan transisi tidak ke arah pembentukan demokrasi, tetapi ke terkonsolidasikan kembalinya otoritarianisme. Agar pers bisa memosisikan peran dan fungsinya untuk ikut memberikan makna terhadap reformasi, maka dengan sendirinya pers pun terlebih dahulu perlu mereformasi diri. Setidaknya, media pers tak lagi digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Pers harus benar-benar independen.

Semenjak pergantian presiden pada 21 Mei 1998, pemerintah telah mengeluarkan begitu banyak Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) baru. Jumlah media massa mengalami pembengkakan secara sangat cepat dan dramatis. Reformasi pun ditandai oleh berkembangnya kebebasan pers serta peningkatan lalu lintas informasi. Informasi pun mengalami peragaman (pluralisasi). Kini, tak ada lagi sumber informasi yang cenderung tunggal dan jenis informasi yang cenderung seragam.

Begitulah memang, di satu sisi pluralisasi informasi memiliki kecenderungan positif, namun tak bisa dipungkiri bahwa pluralisasi informasi juga mendatangkan kebingungan di tengah masyarakat.

Informasi yang meluap dan beragam justru mendatangkan kemungkinan distorsi informasi atau disinformasi yang sangat besar. Dalam kerangka ini, reformasi di bidang informasi semestinya dilakukan dengan menegakkan mekanisme baru bagi pertanggungjawaban informasi. Karena itu, ada baiknya wacana yang berkembang sejak lama—agar kita mendirikan peradilan pers—dipertimbangkan secara saksama sebagai bagian pemaknaan reformasi yang tepat.

Fenomena Pers Islam

Kehadiran suatu pers Islam, atau pers yang Islami, yang maju dan bermutu, serta berdaya jangkau luas, mutlak diperlukan. Namun, di sinilah ironisnya; di negara yang penduduknya mayoritas Islam ini justru media pers lebih banyak didominasi oleh kaum non-Muslim. Berbagai penerbitan surat kabar yang memiliki tiras terbesar tampaknya lebih banyak dimiliki kelompok penerbitan non-Islam.

Mengkaji fenomena penerbitan pers Islam sekarang, tidak dapat dilepaskan dari suatu kenyataan bangkitnya pers Nasrani yang besar di lingkungan umat dan pembaca kalangan Islam. Banyak pakar dan pengamat pers yang tidak bisa mengerti fenomena tadi. Karena itu, ada beberapa studi dilakukan orang dan bahkan seorang pendeta Belanda membuat disertasi mengenai “*Harian Kompas* sebagai Surat Kabar Katolik: Sebuah Fenomena Pers dalam Pluralisme Agama di Indonesia” (Assegaff, 1992).

Kemunculan pers Nasrani tadi tidak bisa dilepaskan dengan masa akhir Demokrasi Terpimpin, ketika Soekarno membredel 26 surat kabar yang pro-BPS (Badan Pendukung Soekarnoisme). Beberapa minggu kemudian, Menteri Penerangan Achmadi mengeluarkan peraturan tentang izin penerbitan pers. Peraturan tersebut mengatur bahwa izin terbit hanya diberikan kepada surat kabar yang mempunyai pendukung partai politik atau kekuatan sosial yang diakui saat itu.

Ketika itulah lahir surat kabar *Kompas* yang didukung oleh Partai Katolik. Cikal bakal surat kabar *Suara Pembaruan* juga lahir dengan

dukungan dari Partai Kristen (Assegaff, 1992). Kedua surat kabar ini beruntung pula mendapatkan tenaga-tenaga profesional yang umumnya sudah berpengalaman di surat kabar dagang kelompok *Keng Po* dan *Sinpo* yang beberapa waktu sebelumnya ditutup pemerintah.

Sementara itu, pers Islam yang didukung oleh partai Islam, ketika itu, tetap hadir sebagai pers partisan dan pers politik. Ia berkembang tidak dengan dukungan profesionalisme, melainkan oleh dukungan dana-dana politik, seperti *Duta Masyarakat* yang didukung NU (Nahdlatul Ulama) dan sebuah lagi yang didukung oleh partai politik Pertis. Karena dikelola tidak sebagaimana mestinya, baik dalam bidang redaksi maupun manajemen, surat kabar tersebut mengalami kebangkrutan ketika partai yang mendukung dana penerbitannya sudah tidak memadai. Padahal, untuk menerbitkan koran atau majalah, diperlukan persiapan dan perencanaan yang matang, modal yang besar, perangkat keras dan alat-alat perkantoran yang serba canggih.

Begitulah, sejak saat itu di kalangan umat Islam terasa timbul kepedihan dan keprihatinan menyaksikan pertumbuhan pers Nasrani yang pesat di tengah pembaca mayoritas Muslim, yang juga menghidupinya dengan berlangganan. Surat kabar ini kian maju pesat justru di saat koran-koran lain diberangus setelah peristiwa “Malari” (Assegaff, 1992).

Kini pun, kondisi pers Islam seakan tidak jauh beranjak dari bayang-bayang kesulitan dan tantangan masa lalu. Selain majalah *Sabili*, sulit mencari pers yang memakai label Islam mencapai tiras di atas 100.000 eksemplar. Misalnya, *Adil* hanya bisa terbit dengan tiras 4.000 eksemplar setiap kali terbit. *Gema Islam*, 10.000 eksemplar (1961). *Suara Muhammadiyah*, 20.000 eksemplar (1988). *Salam*, 42.000 eksemplar (1990). *Panjimas*, pada tahun 1983, hanya sanggup mencapai angka tiras tertinggi 65.000 eksemplar (Junaedhie, 1995; Anwar, 1993). Kenyataan ini sangat bertentangan dengan gencarnya isu fenomena kebangkitan Islam di kalangan kaum muda.

Meskipun majalah *Sabili* sudah mencapai 100.000 eksemplar, namun hingga bulan Mei 2001,

iklan media Islam ini hanya mampu menyerap iklan 10-15 % dari jumlah halaman. Persentase ini, menurut Agus Muhammad, tergolong kecil untuk oplah *Sabili* sebesar itu (Muhammad, 2001).

Harus diakui, sejak dua dasawarsa terakhir ini berbagai aktivitas keislaman yang dilakukan di kalangan kampus maupun di lembaga-lembaga kepemudaan Islam, dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya, tampil amat marak. Jumlah mesjid bertambah, jumlah calon jamaah haji meningkat, jumlah zakat/*infaq/sadaqah* cenderung menaik. Banyak majelis taklim bermunculan. Banyak lembaga pendidikan didirikan. Pesantren baru berdiri di mana-mana. Para ustadz, kiai, dan *da'i* mampu menembus berbagai sektor kehidupan masyarakat. Bahkan, dunia artis pun sanggup dirambah. Kegiatan-kegiatan semacam pesantren kilat, studi dasar keislaman, ramadhan di kampus, dan lain-lain amat sering digelar. Bahkan, sekolah-sekolah yang dipercaya memberikan pelajaran agama Islam yang lebih baik, cenderung menjadi favorit dan laku keras. Pengajian-pengajian di kalangan menengah atas pun tampaknya semakin menjamur. Perkembangan pengkajian Islam yang semarak di kalangan masyarakat yang peka informasi itu semestinya diiringi dengan pertumbuhan pers Islam. Namun, kenyataannya tidaklah demikian. Justru, penerbitan-penerbitan yang hanya mengobral seks dan berita-berita sensasional makin melejit, sementara pers Islam masih tampak “terseok-seok”.

Konsep “jurnalisme *lher*” Arswendo, misalnya, dari segi komersial, sangat berhasil. Tatkala *Monitor* dibreidel pada 23 Oktober 1990, tirasnya mencapai 600.000 eksemplar. Tetapi, tabloid ini ditutup bukan karena kegemarannya mengekspos seks, melainkan karena memuat hasil angket yang diberi nama “Ini Dia 50 Tokoh yang Dikagumi Pembaca Kita”. Hasil angket itu mencantumkan nama Nabi Muhammad saw pada urutan ke-11, setingkat di bawah nama Arswendo Atmowiloto. Angket ini, oleh masyarakat Islam di Indonesia, dinilai sangat menghina dan merendahkan Nabi serta melukai hati segenap umat Islam (Lesmana, 1995).

Menurut Jalaluddin Rakhmat, kasus *Monitor*

hanyalah satu langkah dari sejumlah langkah untuk mendeskreditkan Islam dan umatnya. Mula-mula dimasukkan jurnalisme *lher* dan *serr* untuk merusak akhlak, kemudian kehidupan mewah dan glamour untuk meningkatkan pola hidup konsumtif yang menghancurkan ekonomi, dan akhirnya merendahkan Nabi Muhammad saw untuk menghancurkan akidah umat (Rakhmat, 1991).

Mencermati fenomena itu kemudian muncul pertanyaan, mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi? Apakah para pembaca potensial media Islam itu, yang menurut hasil penelitian *Pan Asia Research* pada tahun 1984 (Hamka, 1989) umumnya adalah orang-orang dewasa dan dewasa muda memang kurang minat baca? Ataukah karena pers yang berlabelkan “Islam” yang ada dipandang tidak aspiratif dan tidak profesional? Padahal, dari segi ekonomi dan penghasilannya, pangsa pasar media Islam umumnya adalah mereka yang tingkat penghasilannya dari golongan menengah ke atas, dan mereka dari segi keagamaan merupakan kelompok umat Islam yang cukup terbuka dan dapat menerima unsur-unsur asimilatif dan akulturatif dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Lebih jelasnya, pangsa pasar media Islam, berdasarkan hasil penelitian *Pan Asia Research* (dalam Hamka, 1989), menunjukkan: kelompok terbesar adalah pegawai pemerintah dan swasta (32%); tempat kedua diduduki dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat atau para pemimpin nonformal (22%), kalangan pedagang dan petani (20%), kaum ibu (6%), dan kalangan-kalangan lain (7%).

Berdasarkan survei yang dilakukan majalah *Panji Masyarakat* tahun 1975, penyebaran dan jumlah pembaca di ibukota propinsi seperti Bandung, Surabaya, Medan, Banjarmasin, dan Ujung Pandang, lebih besar dari Ibukota Jakarta. Golongan pembaca pers Islam (khususnya *Panjimas*) sebagian besar adalah guru-guru agama dan aktivis organisasi Islam, pengurus Muhammadiyah, NU, dan sebagainya. Karenanya, ada sementara orang yang mengatakan pers Islam sebagai pers daerah. Menurut Rusjdi Hamka, sebagai pers daerah itu niscaya besar sekali risikonya, karena sulitnya penagihan dari para agen

dan langganan serta lamanya peredaran uang (Hamka, 1990).

Menceramati persoalan yang membelenggu pers Islam memang ibarat lingkaran setan yang tiada habisnya. Antara sebab dan akibat semuanya bertali-temali, sehingga tak akan ada ujung dan pangkalnya. Kondisi tersebut sudah berlangsung lama, meski dalam kondisi Muslim yang mayoritas di Indonesia.

Dalam pandangan seorang pakar komunikasi dari Bandung, Deddy Mulyana, kondisi pers Islam yang memprihatinkan terkait erat dengan kondisi umat Islam Indonesia yang belum mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara baik. Malah, menurut guru besar Pascasarjana dan Fikom Unpad ini, kehidupan umat Islam sudah dirasuki nilai-nilai Barat dan Muslim dengan “ikhlas” mengamalkannya. Cara-cara hidup, budaya sehari-hari, sampai kebutuhan merupakan gaya dan pengaruh Barat, sehingga ketika melihat pers Islam yang mengusung nilai-nilai ideal, yakni memburnikan dan menegakkan tauhid, *'amar ma'ruf nahi munkar*, dan menyejahterakan umat, penduduk mayoritas ini akan terasa asing mengonsumsinya.

Terkait persoalan di atas, AB Susanto mengungkapkan,

Seseorang hidup di Medan, namun gaya hidup yang dipakai selalu dengan kehidupan Amerika. Dialek *American Style*, makan hamburger, minum Jack Daniel, jaket jeans dengan gambar bendera Amerika. Orang tersebut jelas hidup di sebuah menara gading, alias tidak membumi. Bisa pula dia terkena penyakit. Nama penyakitnya: krisis identitas (Susanto, 2001).

Dalam hal mengonsumsi informasi pun, seperti dikatakan Mulyana (2000), masyarakat lebih senang mengonsumsi berita-berita yang sesuai dengan definisi berita dari Barat. Yakni, *if dog bites a man is not news, but if a man bites dog is news* (kalau anjing menggigit manusia bukanlah berita, tapi kalau manusia menggigit anjing adalah berita). Jadi, kata Mulyana, berita haruslah menarik perhatian sehingga yang keluar adalah berita sensasi, seks, konflik, atau kriminal. Jenis berita ini sudah pula dipraktikkan pers Islam maupun pers

bernuansa Islam. Semua kalangan, baik masyarakat maupun pers, sudah terjebak pada pola-pola pemberitaan seperti itu (Mulyana, 2000).

“Jihad Melawan Komplotan ‘Syetan’ Cabul” adalah sebuah judul besar di kulit muka *Sabili*, 14 Juli 2000. Di bawahnya tertulis “*Overseas Chinese di Balik Kerusuhan.*” Judul-judul seperti itu kerap terpampang di kulit muka *Sabili*. “Hampir tiap edisi, judul *Sabili* langsung menyentuh emosi pembaca. Dalam soal konflik horisontal yang bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, judul yang dipakai *Sabili* lebih keras lagi” (Muhammad, 2001).

Misalnya, “Agama di Balik Kebringasan Pasukan Salib” adalah judul besar pada edisi 9 Februari 2000. Di atas logo *Sabili*, tertulis “Prof. Dr. Nurcholish Madjid: Kalau Dizalimi, Kita Boleh Balas,” lengkap dengan foto Madjid.

Atmakusumah Astraatmadja, mantan Ketua Dewan Pers, dan mantan wartawan *Indonesia Raya*, serta salah seorang wartawan senior Indonesia yang paling *getol* ceramah soal etika pers, menyodok reputasi *Sabili* ketika mengatakan *Sabili* sebagai “media pamflet”. Menurut Astraatmadja, sebuah media disebut pamflet bila gaya penulisan dan gaya penyajian laporannya tidak sesuai dengan standar profesional pers dan kode etik jurnalistik. Menurutnya, paling tidak ada dua syarat yang harus dipenuhi, akurasi dan *fair* (Muhammad, 2001).

Persoalan pelik lain yang berkaitan dengan permasalahan penerbitan pers Islam, bisa lebih diperpanjang lagi. Misalnya, harus diakui bahwa dukungan dari kalangan dunia usaha terhadap pers Islam terasa masih sangat kurang. Bambang Dwi Cahyono dari *Komunika Advertising* melihat iklan *Sabili* yang kecil walaupun media Islam ini sudah bertiras sekitar 100.000 eksemplar adalah risiko dari pilihan topik yang difokuskan pada tema yang sangat *segmented*. Menurut Bambang, ada banyak media yang memang ditujukan kepada orang yang punya *concern* terhadap segmen tertentu, misalnya majalah arsitek, otomotif, atau pertanian yang sengaja menciptakan segmen pembaca yang terbatas (Muhammad, 2001).

Adalah suatu hal yang mustahil jika ada sebuah penerbitan pers yang tidak membutuhkan

iklan untuk kelangsungan hidupnya. Dengan iklan yang masih minim jumlahnya serta pelanggan yang masih sangat terbatas, membuat pers Islam seperti dalam kasus Tabloid *Salam, Hikmah, Kiblat, Suara Masjid, Media Dakwah*, tidak bisa hidup secara wajar. Untuk kelangsungan penerbitannya saja tak jarang harus kembang-kempis. Terlebih lagi jika harus bersaing dengan sejumlah pers umum yang dari segi perjalanan hidupnya saja sudah amat merasakan pahit manisnya mengemudikan dunia penerbitan pers.

Disebabkan minimnya dukungan dari umat Islam sendiri akhirnya pers Islam tampil apa adanya. Pers Islam tidak memiliki wartawan atau reporter yang handal, karena para wartawan yang handal dan profesional pada umumnya mencari dan mengabdikan pada penerbitan-penerbitan yang dianggapnya sudah mapan dan bisa menjamin kebutuhan materi yang relatif memuaskan. Pers Islam juga pada umumnya tidak mampu menyediakan atau membeli kertas serta alat-alat cetak yang relatif lebih baik dibandingkan dengan pers umum, sehingga tampilan mutu cetaknya terkesan apa adanya, terkesan asal bisa terbit. Lihat saja, misalnya, majalah *Suara Masjid, Panji Masyarakat, Risalah*, atau *Media Da'wah*, ketika media ini terbit di era 1980 atau 1990-an.

Menurut Dja'far Assegaff, kelemahan yang tampak dalam pers Islam adalah sikap partisan yang tidak memungkinkan para profesional bekerja secara penuh. Suardi Tasrif almarhum (bersama Abdullah Nasir dan Mara Karma) sebagai wartawan profesional yang memimpin harian *Abadi* (Masyumi) hanya mendapat kepercayaan dari tokoh pimpinan partai. Sebaliknya, pada jajaran redaksi dan wartawannya terdapat orang-orang yang bekerja karena "didudukkan" oleh tokoh-tokoh partai atau anggota DPP partai Masyumi (Assegaff, 1993). Dikatakan,

Sebagai wakil pemimpin redaksi harian *Abadi* periode penerbitan kedua, di zaman Prawoto Manhkunsasmito (1958-1960), saya pribadi mengalami masalah keterbatasan tenaga profesional. Selain H. Sidi Mohd. Syaaf sebagai pemimpin redaksi yang merupakan tenaga profesional, terdapat tenaga-tenaga dari kalangan non-

profesional yang direkrut karena dekat dengan beberapa tokoh atau berasal dari organisasi yang bernaung di bawah Masyumi (Assegaff, 1993).

Akibatnya—dan ini lebih mengesankan lagi—adalah kesimpangsiuran informasi yang merugikan umat Islam itu sendiri. Dalam kasus Maluku, misalnya, amat sedikit pers umum yang memberitakan kejadian tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sedikit sekali media massa yang memiliki keberpihakan kepada umat Islam. Jika sudah begini, yang rugi adalah umat Islam sendiri. Karena itu, adalah kewajiban para pengelola media massa yang umumnya Muslim untuk memiliki kesadaran berdakwah, memunculkan media Islam. Di pihak lain, adalah juga kewajiban umat Islam untuk mendukung kelangsungan hidup media Islam yang muncul tersebut.

Konspirasi Internasional dan Upaya Kaum Yahudi Menguasai Media

Persoalan lain adalah adanya konspirasi (persekongkolan) internasional, yang dirasakan kian mencekik. Ini, misalnya, dapat dilihat dengan adanya jaringan informasi yang kokoh melalui kantor-kantor berita yang ada, dan umumnya dimiliki oleh Barat (Yahudi). Sumber berita yang ada juga sangat bergantung dari pihak Barat. Sudah barang tentu dominasi ini akan terus berlangsung.

The New York Times, The Wall Street Journal, dan *The Washington Post*, tiga surat kabar kelas dunia ini menentukan arah pemberitaan, serta pengambilan keputusan oleh tokoh-tokoh di seluruh ibukota negara di dunia. Mereka menentukan apa yang patut menjadi *berita* dan apa yang bukan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Mereka menciptakan berita. Koran lain sekadar menyalin dan meneruskannya ke seluruh penjuru dunia. Ketiga harian ini milik pemodal Yahudi, seperti juga koran-koran lain di Amerika Serikat dan di sebagian besar penjuru dunia. Keluarga Suzberger, seorang pemodal Yahudi yang menguasai *The New York Times Company*, masih menguasai 36 buah perusahaan surat kabar lainnya, dan dua belas majalah, termasuk

McCall's dan *Family Circle*. Pemilikan orang Yahudi atas media cetak tidak berhenti hanya pada koran yang berpengaruh, tetapi bahkan sampai kepada koran-koran kuning di New York, seperti *The Daily News*, dan *The New York Post*, yang dimiliki seorang milyarder Yahudi yang juga pengembang *real-estate*, Peter Kalikow. Koran *The Village Voice* juga milik seorang pemodal Yahudi bernama Leonard Stern.

Menyinggung ihwal penerbitan majalah, pada dasarnya hanya ada tiga majalah yang pantas dicatat di Amerika Serikat, *Time*, *Newsweek*, dan *US News and World Report*. Pemimpin eksekutif *Time Warner Corporation* adalah Steven J. Ross, dan orang ini pun seorang Yahudi.

Di dunia perbukuan, terdapat tiga penerbit buku kaliber raksasa, *Random House*, *Simon & Schuster*, dan *Time Inc. Book Co.* Kesemuanya dimiliki oleh pemodal Yahudi. Pemimpin eksekutif *Simon & Schuster* ialah Richard Snyder, dan ketuanya Jeremy Kaplan, keduanya orang Yahudi. *Western Publishing* ada pada peringkat paling atas, yang menerbitkan buku-buku untuk kanak-kanak, dengan pangsa pasar yang dikuasainya 50% dari pangsa pasar buku untuk kanak-kanak yang ada di dunia. Ketua sekaligus pemimpin eksekutifnya ialah Richard Bernstein, seorang Yahudi.

Di dunia media elektronik dan hiburan, konglomerat media terbesar saat ini adalah *Walt Disney Company*, di mana pemimpin eksekutifnya, Michael Eisner, juga Yahudi. Kerajaan Disney dikepalai oleh seorang yang oleh salah satu analis media disebut-sebut sebagai “tukang kontrol,” termasuk beberapa perusahaan produksi TV (*Walt Disney Television*, *Touchstone Television*, *Buena Vista Television*), jaringan TV kabelnya, termasuk di Indonesia, meliputi 14 juta pelanggan, dan dua perusahaan yang memproduksi video. Dan jangan lupa pula dengan *CNN*, siaran TV paling berpengaruh dengan jaringannya yang meliputi nyaris ke seluruh jagat, dikuasai oleh Ted Turner, yang juga orang Yahudi.

Selain itu, dua perusahaan produksi film terbesar di dunia, *MCA* dan *Universal Pictures*, dimiliki oleh satu perusahaan, *Seagram Co. Ltd.* Pemilik *Seagram* juga seorang raksasa produsen

minuman keras, Edgar Bronman, yang menjabat sebagai ketua *World Jewish Congress* (Kongres Yahudi se-Dunia). Perusahaan yang pernah merajai dunia perfilman seperti Melvyn, Goldwyn, Meyer (MGM) diambil dari nama tiga-serangkai Yahudi. Lalu, perusahaan film *Dreamworks* yang diketuai David Geffen, Steven Spielberg, dan Jeffrey Katzenberg, dikenal dengan film-film mereka yang menggunakan *special effect* yang memukau para penggemarnya di seluruh dunia. Kemudian, siaran TV terbesar di dunia, *ABC*, *CBS*, dan *NBC*, melalui merger kerajaan elektronika, ketiganya ada di bawah kontrol Yahudi (Maulani, 2003).

Kantor berita terbesar di dunia adalah *Reuters*. Kantor berita ini didirikan oleh Julius Reuter—seorang Yahudi tulen—pada 1816 M. *The United Press International (UPI)*, salah satu kantor berita besar Amerika Serikat adalah hasil merger *Schribs Howard United Press* dan *International News Service* yang didirikan William Herset pada 1909. Herset beristrikan wanita Yahudi dan atas dukungan warga Yahudi AS, ia berhasil menjadi kepala negara bagian New York. Lantas, di Prancis, seorang warga Yahudi mendirikan kantor berita *Havas*. Pada 1835, kantor berita ini berubah menjadi kantor berita resmi Prancis (Samantho, 2002).

Kolonialisme Barat atas Dunia Islam

Banyak wartawan Barat yang ditempatkan di berbagai negeri Muslim, baik sebagai penulis lepas maupun sebagai wakil surat kabar mereka. Namun, banyak surat kabar dan kantor berita di negeri-negeri Muslim tak menjadikan media dunia Muslim independen. Suatu penelitian atas 25 surat kabar dalam bahasa-bahasa Inggris, Arab, Persia, dan Urdu, menunjukkan, lebih dari 80 persen berita tentang dunia Muslim berasal dari empat Kantor Berita Internasional utama: *Associated Press (AP)*, *Agence France Presse (AFP)*, *United Press International (UPI)* dan *Reuters*. Terbukti pula bahwa 25 surat kabar dan majalah hampir tak pernah memuat artikel atau berita tentang Barat yang ditulis para koresponden mereka sendiri (Abdullah, 1987).

Dalam situasi ketergantungan kepada kantor-

kantor berita asing ini, hampir tidak mungkin mencari liputan alternatif. Pandangan peristiwa-peristiwa dunia yang diterima seorang pembaca, tentang negeri-negeri Muslim dan bahkan tentang negerinya sendiri, pada dasarnya merupakan pandangan yang disajikan kantor-kantor berita internasional (Abdullah, 1987).

Kokohnya jaringan kantor berita itu sangat terkait dengan masalah politik, ekonomi, militer, dan budaya, yang tujuannya adalah tentu saja kolonialisme (penjajahan) Barat atas Dunia Islam. Mereka memiliki kepentingan politik, ekonomi, militer, dan budaya yang harus mereka pertahankan. Karena itu, mereka (kaum Yahudi/kaum Zionis) berusaha mendominasi sumber-sumber informasi melalui media massa yang ada, termasuk kantor berita. Melalui media massa yang ada, dengan sangat efektif mereka membentuk opini publik di kalangan masyarakat Islam.

Pembentukan opini ini diciptakan melalui imagi Barat tentang masyarakat-masyarakat Muslim. “Fanatik, tidak kompeten, fundamentalis, biadab, otokratis, haus darah.” Itulah beberapa atribut untuk menggambarkan kaum Muslimin dan masyarakat-masyarakat Muslim di Barat (Sardar, 1988). Atribut-atribut ini, maupun imagi yang mereka abadikan, menurut Sardar, memiliki sejarah yang panjang. Dalam ilmu pengetahuan dan literatur, maupun dalam jurnalisme dan fiksi populer, kaum Muslimin digambarkan sebagai kaum ganas yang haus darah, yang memotong tangan pencuri, merajam wanita pezina sampai mati, atau mencambuk orang yang meminum alkohol. Imagi ini diabadikan dengan konsistensi dan kegarangan sedemikian, sehingga banyak kaum Muslimin sendiri mempercayai imagi ini, dan berupaya berbuat sesuai dengan karikatur ini.

Menurut Ziauddin Sardar, ada satu alasan sangat kuat kenapa kaum Muslimin telah menjadi sasaran imagi-imagi terdistorsi terus-menerus ini. Islam adalah satu-satunya peradaban yang telah menimbulkan—di masa lalu, dan kiranya di masa datang—suatu ancaman serius bagi dominasi intelektual dan politis Barat. Sejak kedatangan Islam, dan penyebarannya yang luar biasa, hampir selama beberapa dekade, dari Maroko sampai Cina,

Islam telah dipandang oleh Barat sebagai peradaban dan kultur “lain” (Sardar, 1988).

Pada bagian lain, Sardar menulis,

Islam telah menjadi trauma bagi Eropa. Bagi kaum Kristen abad pertengahan, Islam itu problematis. Yang pertama dan terutama adalah sebagai suatu problem bagi “theodisi” (mempertahankan keadilan Tuhan di hadapan eksistensi kejahatan) Kristen. Tujuan apa yang hendak dicapai Muhammad ketika Tuhan sendiri sudah muncul di muka bumi ini? Kenapa kelahiran seorang Nabi Arab, lama setelah masa kenabian berpuncak pada penyaliban dan kebangkitan kembali putra Tuhan, sesuai dengan rencana ilahi tentang penyelamatan? Persoalan ini menggusarkan kaum Kristen dalam hubungannya dengan Islam selama lebih 1400 tahun. Tetapi, Islam tidak saja menimbulkan suatu problem keagamaan. Kekuatan empirium Islam merupakan tantangan serius bagi kaum Kristen. Hingga abad ke-18, Empirium Utsmaniyah dipandang oleh orang-orang Eropa sebagai selalu membahayakan peradaban Kristen. Dominasi ilmu dan pengetahuan Islam selama delapan abad jelas menunjukkan bahwa Islam juga menimbulkan suatu problema intelektual. Dan akhirnya, secara ideologis, Islam merupakan suatu problem: penguasaannya atas pikiran berjuta-juta orang, bahkan keberhasilannya mengubah keyakinan berjuta-juta orang Kristen, tak dapat dimengerti oleh kaum Kristen (Sardar, 1988).

Guna mencemarkan Islam, menurut Sardar, Barat menciptakan sejumlah teknik. Yang pertama adalah pemroyeksian terang-terangan imagi Islam dengan menggunakan label-label. Islam dipandang sebagai sisi-gelap Eropa. Maka, ketika Eropa beradab, Islam biadab. Ketika Eropa mencintai perdamaian, kaum Muslimin garang dan haus darah. Sementara di Barat, ada tradisi demokratis dan cinta damai, kaum Muslimin despotis dan kejam. Sementara Eropa bermoral dan bajik, kaum Muslimin amoral dan bejat (Sardar, 1988). Berbagai imagi ini telah diproyeksikan dalam lukisan-lukisan dan literatur-literatur Barat sejak abad ke-17.

Jika ditelusuri akar persoalannya, kita bisa menemukan bahwa ada dua kekuatan besar yang bertarung di panggung pemikiran: Islam *versus* sekularisme. Islam adalah pemikiran asli pribumi, sementara sekularisme adalah pendatang dan

sekaligus penjajah karena datang memang bersamaan dengan kolonial. Pemikiran yang melandasi pola berpikir kaum Muslim seharusnya pemikiran Islam yang mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, ketika Barat menjajah negeri-negeri Islam, mereka turut menyebarkan paham sekularisme yang merupakan *mainstream* mereka. Barat mempersiapkan kader-kader yang akan meneruskan pola berpikir sekularistis jika mereka kelak meninggalkan negeri jajahannya. Di sinilah, sesungguhnya, asal mula percolokan itu terjadi.

Argumen bahwa kaum Muslimin tidak mempunyai suara yang cukup kuat dalam media internasional telah banyak didiskusikan dalam berbagai seminar dan konferensi-konferensi dunia yang diselenggarakan organisasi-organisasi Muslim. Ada banyak keluhan bahwa dunia Barat tak melakukan peliputan atas Islam dan Dunia Muslim secara berimbang dan memadai. Sudah banyak pula desakan bahwa kaum Muslimin harus mengembangkan media internasional mereka sendiri.

Misalnya, sesuai dengan resolusi-resolusi Muktamar Persiapan Pers Islam di Siprus pada bulan Juni 1979, yang antara lain memutuskan membentuk sebuah Sekretariat Jenderal Sementara untuk Pers Islam di bawah naungan Rabithah Al Alam di kota Makkah Al Mukarramah, salah satu tugasnya mempersiapkan Konferensi Pertama untuk Penerangan Islam.

Muktamar Media Massa Islam Pertama Sedunia berlangsung di Jakarta, mulai tanggal 1 sampai tanggal 3 September 1980. Negara-negara peserta Muktamar ini terdiri atas 49 negara, dengan peserta yang hadir sebanyak 450 orang tokoh-tokoh wartawan, penulis, penerbit, dan pemikir-pemikir beragama Islam dari berbagai negara di seluruh dunia (Badan Litbang Penerangan Deppen RI, 1981).

Muktamar telah mendukung dengan suara bulat kertas kerja dari negara Iraq yang menyangkut soal-soal berikut:

(a) Menyokong pernyataan Iraq-Arab Saudi tentang pemboikotan politik dan ekonomi terhadap setiap negara yang membuka kedutaannya di kota Baitul Maqdis.

(b) Membongkar semua tindakan eksistensi Zionis yang menantang perasaan umat Islam dengan keputusan menjadikan Baitul Maqdis sebagai Ibukota Abadi yang dipersatukan bagi eksistensi Zionis itu.

(c) Melawan dan menolak semua kerja teknis atau penerangan yang memusuhi Islam dan memburuk-burukkan prinsip-prinsip yang toleran.

(d) Mengajak negara-negara Islam untuk memperkuat kerjasama di antara mereka demi mempertahankan prinsip-prinsip Islam, dan tidak mengizinkan pihak mana pun mengadakan tantangan terhadap perasaan kaum Muslimin.

(e) Mengajak semua negara Islam, melalui aparat penerangan dan kebudayaannya untuk berdiri menghadapi semua kampanye penerangan yang berusaha menentang berhasilnya negara-negara Islam menguasai teknologi atau untuk tujuan-tujuan damai (Badan Litbang Deppen RI, 1981).

Kemudian, setelah membahas dan memperdebatkan hasil-hasil dari pelbagai komisi yang merupakan rekomendasi, maka tercapailah keputusan-keputusan di bawah ini (Badan Litbang Deppen RI, 1981):

(a) Agar Universitas-Universitas Islam mendirikan bagian publisistik untuk menghasilkan jurnalis terlatih dan berkualifikasi yang mampu melakukan semua cabang penerangan Islam di samping mengadakan sebuah akademi untuk menghasilkan kader-kader yang berkecakapan tinggi.

(b) Menggunakan potensi-potensi Muslimin di berbagai bidang kerja penerangan.

(c) Agar Rabithah Alam Islami mengadopsi tugas mendirikan pusat informasi untuk memberi bekal bidang penerangan dengan informasi-informasi otentik.

(d) Mendorong Sekjen Organisasi negara-negara Islam untuk mengaktifkan peranan Kantor Berita Islam di seluruh dunia Islam dalam waktu secepat mungkin.

(e) Diserukan Kantor-Kantor Berita Dunia Islam untuk menyiarkan dan menonjolkan penyiaran berita-berita dunia Islam serta memberikan perhatian sepenuhnya dalam usaha ini untuk memecahkan belenggu blokade yang hendak dipaksakan oleh prasarana media massa yang memusuhi Islam.

(f) Mempelajari kemungkinan mendirikan harian, majalah mingguan dan bulanan Islam dalam

beberapa bahasa yang terbit pada satu hari yang sama di Ibukota-ibukota dunia internasional dan dunia Islam.

(g) Mempelajari kemungkinan dibentuknya sebuah lembaga atau beberapa lembaga iklan Islam untuk melindungi pers Islam dari tekanan-tekanan perusahaan iklan asing.

(h) Menghimbau negara-negara dan organisasi-organisasi Islam untuk melarang masuk dan beredarnya pers, buletin, dan buku-buku yang memusuhi gagasan-gagasan dan pemikiran Islam atau mempengaruhi aqidah pemuda Muslim. Juga untuk melarang iklan-iklan yang memberikan dukungan komersial tentang sarana media Islam yang memusuhi Islam.

Tetapi, ketika bicara soal tindakan, sedikit saja yang terdengar dari seminar-seminar dan konferensi-konferensi atau muktamar seperti ini. Mereka memang mengusulkan bahwa kaum Muslimin harus memiliki koran-koran dan majalah-majalah yang digunakan sebagai perjuangan Islam. Namun, sedikit usul saja tentang program yang nyata. Tampak bahwa organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga Muslim belum dapat merancang kebijaksanaan media yang sesuai dengan ideologi dan juga profesi jurnalis mereka (Abdullah, 1988).

Lepas dari itu, tampaknya, kaum Muslimin telah memberikan reaksi yang keterlaluan atas peliputan Islam oleh media Barat. Benar bahwa media Barat memang berat sebelah dalam meliput Islam, tetapi ia pun sebenarnya juga berat sebelah dalam meliput semua kelompok dan ideologi lain.

Dalam *cover story* konflik Maluku yang berjudul “Agama di Balik Keberingasan Pasukan Salib”, misalnya, *Sabili* memperlihatkan jalinan erat antara imperialisme Barat dengan motif penyebaran agama Kristen di bumi Nusantara. Jalinan ini memberikan landasan pembenar untuk mbingkai dan memprasangkai konflik yang terjadi di Ambon dan kasus-kasus di wilayah Nusantara lainnya sebagai “sentimen agama”. *Sabili* menulis:

Tidak seperti Islam, agama Katolik dan Kristen Protestan datang ke Nusantara lewat tangan-tangan penjajah kolonialis. Penjajah Spanyol dan Portugis membawa dan menyebarkan agama Katolik, sedangkan penjajah Belanda membawa dan menyebarkan Kristen Protestan. Baik Katolik

maupun Kristen Protestan, masing-masing membawa misi “Tiga G” yakni: *Gold, Glory, dan Gospel* (emas yang melambangkan kekayaan, kekuasaan politik, dan kejayaan gereja). Jika demikian, tidak salah jika suara rekaman kaset mirip-mirip suara Mayjen (Purn) Theo Syaefi, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa sejarah penyebaran agama Kristen memang tidak bersih dari darah (*Sabili*, No.17, Th.VII, 9 Februari 2000).

Memasukkan faktor hubungan sejarah antaragama yang meliputi Perang Salib dan imperialisme Barat-Kristen bisa menimbulkan pertanyaan. Apakah tidak terlalu jauh hubungannya dengan akar sebab prasangka yang mewarnai hubungan antaragama Islam dan Kristen?

Pada dasarnya, prasangka (*prejudice*) adalah konstruk terpenting bagi ilmuwan sosial untuk memahami hubungan antar kelompok etnis, agama, ras, dan budaya (Taylor & Porter, dalam Sudibyo, Hamad, Qodari, 2001). Namun, sejauh ini, fenomena prasangka tetap tidak mudah dan sederhana untuk dijelaskan.

Perhatikan pula, cuplikan *Media Dakwah* ketika menyajikan konflik Ambon dan Maluku Utara berikut ini:

Keretakan hubungan Islam-Kristen akhir-akhir ini sejatinya telah tersulut dengan transparannya berbagai gerakan mahasiswa Kristen yang berpusat di kampus-kampus Kristen seperti: Universitas Katolik Atmajaya, Universitas Kristen Indonesia (UKI), Sekolah Tinggi Theologia (STT), Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara dan lain-lain yang menentang pemerintahan Habibie yang representatif Islam. Bahkan pusat-pusat gerakan demo brutal itu dirancang di berbagai kampus Kristen itu, termasuk pasokan logistik para demonstran radikal itu berasal dari komunitas gereja, karena semua barang yang dikirim selalu diberi label salib (Sudibyo, Hamad, Qodari, 2001).

Dari cuplikan di atas, *Media Dakwah* menunjukkan kehadiran prasangka dan stereotip dalam menuliskan beritanya. Gerakan mahasiswa yang marak di masa pemerintahan Presiden Habibie, khususnya pada bulan November 1998, adalah identik dengan gerakan mahasiswa Kristen,

demikian menurut berita itu. Padahal, di antara yang ikut mendemo Habibie banyak sekali mahasiswa yang juga beragama Islam. Dalam paragraf itu, gerakan mahasiswa Kristen digeneralisasi sebagai gerakan demonstran radikal yang menggunakan basis di kampus-kampus Kristen.

Sementara itu, studi Edward Said mengenai penggambaran Islam dalam pers Barat ada juga relevansinya. Warga negara AS keturunan Palestina tersebut menggambarkan bagaimana pelaporan pers Barat tentang dunia Islam, khususnya dunia Arab, diwarnai oleh suatu “pengetahuan ortodoks” tentang Islam, yang tidak tergantung dari dinamika para subjek berita (yang bervariasi itu) dan apa kata mereka sendiri, melainkan tergantung dari “komunitas penafsir” yang terdiri dari para pekerja media, pakar-pakar yang menjadi langganan wawancara, pemerintah negara-negara Barat, serta perusahaan-perusahaan Barat yang berkiprah di dunia Arab (Aditjondro, dalam Sudibyo, Hamad, Qodari, 2001).

Dalam kasus Islam, distorsi-distorsi tersebut, seperti dikatakan Aslam Abdullah, mungkin merupakan warisan kolonial atau citra-citra stereotip terhadap Muslim, dan bukannya perasaan-perasaan buruk para penulis itu sendiri. Lagi pula secara profesional tidaklah mungkin untuk meliput semua aspek dari suatu peristiwa secara akurat dan objektif dalam suatu periode waktu tertentu. Tidak pula masuk akal mengharapkan mereka yang tidak memandang Islam dan dunia Muslim dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan kaum Muslimin, menulis tentang Islam dengan antusiasme yang sama atau dengan cara yang akan lebih disukai kaum Muslimin (Abdullah, 1988).

Dalam buku *Covering Islam* (1981), Edward Said mengungkapkan secara gamblang dan terinci tentang berbagai distorsi dan bias yang dilakukan Barat terhadap Islam. Jaringan kantor-kantor berita Barat yang mendunia itu secara konstan dan kontinyu menciptakan dan menyebarkan citra yang tidak benar tentang Islam.

Menyadari kenyataan ini, dari negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) muncul inisiatif mendirikan *Interna-*

tional Islamic News Agency (IINA), yang berpusat di Jeddah. Kantor berita internasional Islam ini mulai beroperasi pada Mei 1979; pada 1988, setiap hari ia menyiarkan berita rata-rata sejumlah 7.500 kata atau 35 sampai 45 item berita. Staf tetapnya berjumlah 26 orang, dengan anggaran tahunan sekitar \$ 2 juta. Sebagai perbandingan, *Associated Press (AP)*, kantor berita Amerika mempunyai 76 biro luar negeri dengan 400 wartawan tetap, yang menghabiskan anggaran \$ 40 juta per tahun. *AP* menyampaikan pelayanan topik-topik utama berita dunia yang berfluktuasi antara 51.000 sampai 112.000 kata per hari, atau antara 200 sampai 600 macam berita setiap hari (Azra, 1994).

Dengan melihat pengalaman *IINA* dan *AP*, terlihatlah kepincangan penyebaran informasi tentang Islam dan masyarakat Muslim merupakan fakta sangat riil. Selain *IINA*, memang terdapat kantor-kantor berita Islam bertaraf internasional lainnya, ditambah kantor berita negara-negara Islam sendiri. Namun, sebagai eksperimen relatif baru, kantor-kantor berita Islam itu harus berhadapan dengan jaringan kantor berita raksasa yang sangat mapan, seperti *AP*, *UPI (United Press International)*, *AFP (Agence France Presse)*, dan lain-lain.

Setiap kali diadakan seminar yang membahas pers Islam, maka soal profesionalisme selalu diutarakan, sehingga lambat laun namun pasti, timbul kesan bahwa pers Islam di negeri ini disebabkan oleh wartawannya dan pengelolanya tidak memiliki profesionalisme. Betulkah itu? Barangkali untuk sebagian ada benarnya, tapi tidak keseluruhannya. Lagi pula, sekali-kali perlu dikaji, apakah persisnya yang dimaksud dengan profesionalisme dalam bidang kewartawanan itu?

Dalam kaitan dengan soal profesionalisme tersebut, pada tanggal 17 Januari 1993 di Medan, diselenggarakan seminar membahas “Peranan Pers Islam dalam Membentuk Opini Masyarakat” oleh Senat Mahasiswa FISIP Universitas Sumatera Utara (USU), yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Medan. Seorang pengamat pers Islam, Daud Rasyid Sitorus, pada kesempatan itu mengemukakan, profesionalisme adalah kunci keberhasilan pers Islam. Kalau tidak

didukung oleh profesionalisme dan kedalaman pemahaman ajaran Islam para pengelola lembaga pers tersebut, maka keberhasilan pers Islam menjalankan misinya sebagai pembentuk opini masyarakat tidak akan berjalan baik (Anwar, 1993).

Pengertian profesionalisme hingga kini memang masih beragam. Bahkan, tidak jarang istilah ini disamakan dengan penguasaan teknis dan penampilan individual semata. Lebih rancu lagi, profesionalisme diidentikkan dengan semangat berwiraswasta (*entrepreneurship*) yang jelas-jelas basis nilainya berbeda. Pengertian seperti ini, tentu saja, tidak melihat konteks sosial makna profesionalisme, kedudukan profesionalisme sebagai sistem normatif golongan profesional cenderung terabaikan. Akibatnya, pengertian seperti ini tidak dapat menerangkan bagaimana kaitan profesionalisme di dalam proses sosial secara keseluruhan (Sobur, 2001).

Kriteria utama yang membedakan golongan profesional dari *entrepreneurs* adalah perbedaan nilai. Para profesional tidak meletakkan imbalan materi (*profit oriented*) sebagai tujuan utama, sungguhpun tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang perlu. Sebaliknya, para pengusaha menganggap mencari keuntungan adalah tujuannya (Parsons, dalam Hamzah, 1992).

Pengertian profesionalisme akan lebih jelas jika dibedakan dengan paham-paham yang kurang menghargai profesionalisme. Budaya yang tidak mengutamakan keahlian atau kemampuan pribadi tidak mempersoalkan dengan cara bagaimana suatu hasil dapat diraih. Pada budaya yang demikian, fasilitas, keberuntungan, hubungan-hubungan istimewa, dan cara-cara nonetis tidak dipersoalkan. Dengan demikian jelas bahwa profesionalisme tidak menggantungkan keberhasilan pada kemampuannya dan keahliannya serta mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku dalam profesinya. Mereka akan bersaing melalui standar kualitas karyanya, layanannya, atau produknya. Karena kaidah-kaidah profesi umumnya teruji, profesionalisme menghasilkan kehandalan dan kredibilitas.

Pada umumnya, ada lima kategori yang menurut para sosiolog tercakup oleh

profesionalisme, yang disarankan sebagai struktur sikap yang diperlukan bagi setiap jenis profesi:

- (1) Profesional menggunakan organisasi atau kelompok profesional sebagai kelompok referensi utama. Tujuan-tujuan dan aspirasi-aspirasi profesional bukanlah diperuntukkan bagi seorang majikan atau status lokal dari masyarakat setempat; kesetiaannya adalah pada bidang tugas.
- (2) Profesional melayani masyarakat. Tujuannya melayani masyarakat dengan baik. Ia altruistik, mengutamakan kepentingan umum.
- (3) Profesional memiliki kepedulian atau rasa terpenggil dalam bidangnya. Komitmen ini memperteguh dan melengkapi tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat. Ia melaksanakan profesinya karena merasa komitmennya yang mendalam; dan ini menopangnya selama periode-periode latihan dalam penekanan secara berulang-ulang.
- (4) Profesional memiliki rasa otonomi. Profesional membuat keputusan-keputusan dan ia bebas untuk mengorganisasikan pekerjaannya di dalam kendala-kendala fungsional tertentu.
- (5) Profesional mengatur dirinya sendiri (*self-regulation*). Ia mengontrol perilakunya sendiri. Dalam hal kerumitan tugas dan persyaratan keterampilan, hanya rekan-rekan sepekerjaannya yang mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan penilaian (Sobur, 2001).

Kelima kategori di atas tampak tidak bebas, artinya satu sama lain saling melengkapi. Pendek kata, profesional melakukan pekerjaannya demi kepentingan umum dalam melayani masyarakat.

Meski demikian, profesi dipandang sebagai fenomena relatif, tidak mutlak. Suatu pekerjaan dapat dikatakan lebih profesional daripada pekerjaan lainnya karena memiliki unsur-unsur profesional yang lebih daripada pekerjaan lainnya. Nilai pendekatannya, ciri-ciri psikologis suatu profesional dipisahkan dari sifat-sifat struktural dan organisasional pekerjaan itu (perizinan, ijazah, organisasi profesional).

Memang, berbagai upaya untuk menghadir-

kan pers Islam yang bermutu sesuai aspirasi khalayak pembacanya yang *notabene* beragama Islam tidaklah selalu berjalan mulus. Sejarah perkembangan pers Islam, baik nasional (seperti *Medan Priaji*, *Duta Masyarakat*, atau *Abadi*) maupun internasional (seperti *Islamic World Review*), mencatat, nyaris tidak ada pers Islam yang mampu bertahan lama. Mencapai usia sepuluh tahunan, sudah dianggap prestasi gemilang. Padahal, ketika hadir di tengah publik, pers Islam selalu mendapat sambutan. Publik memang membutuhkan. Namun, ketahanan daya hidup apa pun—apalagi penerbitan pers yang membutuhkan modal besar—tidak cuma sekadar dibutuhkan. Perlu ada kepedulian. Terutama pada zaman penuh persaingan bisnis, serta materi menjadi acuan nomor satu.

Dulu, pers Islam pernah mampu menyemarakkan dunia pers. Sebut saja misalnya harian *Abadi*, organ Partai Masyumi, yang sangat berperan pada era multipartai tahun 1950-1960. Mengandalkan fanatisme pendukung Masyumi, harian *Abadi* memiliki tiras cukup besar (lihat Tabel 1), jaringan cukup luas, dan isi yang bagus. Para pengelola *Abadi* mampu mengolah misi dan visi Islam dalam bentuk berita dan artikel. Tulisan-tulisan bercorak politik dalam *Abadi* selalu diperhitungkan oleh kawan dan lawan politik Masyumi.

Namun, sayang, tahun 1960, Masyumi dipaksa bubar oleh rezim Demokrasi Terpimpin Orde Lama. Baru muncul lagi pada era Orde Baru. Masih menampilkan “watak keras” Masyumi, walaupun Masyumi sendiri sebagai partai tidak diizinkan hidup kembali.

Tabel 1
Tiras Harian *Abadi* di Antara Empat Besar Surat Kabar yang Terbit di Jakarta Tahun 1954

Nama Surat Kabar	Aliran	Tiras
<i>Harian Rakyat</i>	PKI	55.000/hari
<i>Pedoman</i>	PSI	48.000/hari
<i>Suluh Indonesia</i>	PNI	40.000/hari
<i>Abadi</i>	Masyumi	34.000/hari

sumber: *Tribuana Said*, 1988; *Yasuo Hanazaki*, 1998

Harian Islam *Abadi* era Orde Baru, terhitung singkat. Terbit tahun 1967, dibreidel tahun 1974, akibat peristiwa “Malari”. Tulisan yang cukup memikat dalam *Abadi* babak kedua adalah polemik tentang dwifungsi ABRI, antara Mr. SM Amin dengan Mabas ABRI/Hankam. Tulisan SM Amin yang mengkritik keras dwifungsi ABRI, dimuat dalam *Abadi*. Pihak Hankam/Mabas ABRI menjawab melalui harian *Berita Yudha*. Polemik amat berharga ini sempat dibukukan menjadi *Polemik dengan Berita Yudha* (Usep, 2000). Di era pasca-Orde Baru sekarang ini, *Abadi* kembali terbit berupa tabloid mingguan dan menjadi organ Partai Bulan Bintang.

Survei yang dilakukan Litbang Redaksi *Republika* dengan *The Asia Foundation* yang dilakukan pada tahun 1998-1999, menemukan sedikitnya 34 pers Islam di Indonesia yang terbit antara 1970-1993. Secara sederhana, survei ini merumuskan pengertian pers Islam sebagai “pers yang dalam kegiatan jurnalistiknya melayani kepentingan umat Islam, baik yang berupa materi (misalnya kepentingan politik) maupun nilai-nilai”. Pers Islam yang disurvei dibatasi pada majalah atau surat kabar yang memiliki Surat Izin Terbit (SIT) dan atau Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Dengan pengertian seperti itu, penerbitan pers yang tidak dimiliki oleh individu atau organisasi Islam tertentu dapat juga digolongkan sebagai pers Islam sejauh isi, visi, dan misinya menyentuh kepentingan umat Islam. Nama-nama penerbitan pers Islam serta penerbit/pemilik secara lebih terinci bisa dilihat pada Tabel 2.

Tradisi pers yang hidup sejak awal abad ke-20, tidak memberi jaminan bagi satu pun penerbit pers Islam untuk menjadi sebuah media besar dalam usia cukup panjang. Harian *Pelita* yang terbit sejak tahun 1974 dan menjadi alternatif koran Islam setelah dibreidelnya harian *Abadi*, pernah mencapai tiras di atas 200.000 eksemplar pada kurun waktu antara 1977 dan 1982. Pencapaian tiras sebesar itu sekaligus membuat *Pelita* mengukir sejarah sebagai koran yang pernah mengalahkan harian *Kompas*, meski hanya untuk beberapa saat (Edwin *et al.*, 2000).

Kalau saja *Pelita* tidak terus-menerus ditekan

dan tidak dikooptasi oleh tokoh-tokoh Golkar secara perlahan-lahan sejak tahun 1982 dan secara resmi tahun 1987, ada kemungkinan koran ini akan menjadi koran besar yang bersaing dengan *Kompas* untuk waktu yang lebih lama. Tetapi, karena berbagai bentuk tekanan politik, mulai dari pembreidelan secara berulang-ulang, upaya-upaya

persuasi tokoh-tokoh Muslim Golkar hingga senjata undang-undang yang menekan dengan persyaratan modal, *Pelita* akhirnya menyerah kepada Golkar. Dan sejak jatuh ke tangan partai penguasa zaman Orde Baru itu, *Pelita* pun menjadi koran dengan ideologi “Islam Pembangunan” (Edwin *at al.*, 2000).

Tabel 2.
Penerbitan Pers Islam 1970-1993

No	Nama	Penerbit/Pemilik
1	SKH Angkatan Baru	Muhammadiyah
2	SK Duta Masyarakat (Jakarta)	Nahdlatul Ulama
3	Suara Islam	Jajasan Kesedjahteraan Umat Islam
4	Majalah Budi	Pusat Kerohanian Islam Angkatan Darat
5	Majalah Gema Islam	Jajasan Perpustakaan Islam Pusat
6	Majalah Gagasan	Jajasan Kesetiaan
7	Majalah Kiblat	Penerbit Kiblat
8	Majalah Pandji Masyarakat	Kebangkitan/Muhammadiyah
9	Majalah Seri Dakwah Islam	Jajasan Pendidikan Tinggi Da'wah Islam
10	Majalah Sinar Keemasan	Tharikat Islam
11	Majalah Risalah	Persatuan Islam (Persis) Bandung
12	SKH Duta Masyarakat (Semarang)	Jajasan Duta Massa/Nahdlatul Ulama
13	SKM Adil	PT Adil
14	SKH Mertju Suar (Yogyakarta)	Jajasan Mertju Suar tjabang Jokjakarta
15	Majalah Al Djami'ah	Jajasan Djami'ah “Sunan Kalijaga”
16	Majalah Suara Muhammadiyah	PP Muhammadiyah
17	SKH Nusantara Baru	Jajasan Kesedjahteraan dan Perbendaharaan Buruh Islam Cabang Banda Aceh
18	Majalah Sinar Darussalam	Studi Klub Islam Darussalam
19	SKH Mertju Suar (Medan)	Jajasan Mertju Suar Cabang Medan
20	SK Api Djihad	Jajasan Api Djihad
21	SKH Duta Masyarakat (Sumsel)	PT Batang Hari Sembilan Palembang
22	SKH Tjahaja Timur	Jajasan Pembina Dana Muslimin Indonesia
23	SKH Duta Masyarakat	Jajasan Penerbit Duta/Nahdlatul Ulama
24	SKH Pembela	Jajasan Fitrah
25	SKM Hanura	Jajasan Ummat
26	SKM Angkatan Baru	Jajasan Kalam
27	SKH Mertju Suar (Manado)	Jajasan Mertju Suar
28	SKM Alachbar	Jajasan Raden Saleh
29	SKM Mimbar Dakwah	Senat mahasiswa Fak. Sjariah Darussalam
30	SKM Demi Masa	Yayasan Demi Masa
31	SKH Fajar	PT Media Fajar
32	SKH Abadi	PT Kramat Empat Lima
33	Majalah Semesta	Yayasan Muttaqin
34	SKH Republika	PT Abdi Bangsa/ICMI

Sumber: *Republika*, 26 April 2000.

Patut disayangkan memang. Sebab, pada awal terbitnya, surat kabar *Pelita* mengemukakan jatidirinya sebagai surat kabar Islam. Secara lebih spesifik, dalam pikiran masyarakat, *Pelita* ditautkan dengan partai politik PPP. Zaman beredar, pimpinan dan kepemilikan *Pelita* turut beredar dan diketahui sebagian besar para pemegang sahamnya orang-orang dari Golkar. Belakangan, mungkin *Pelita* mengaku dirinya sebagai surat kabar Islam, tetapi kemudian tidak banyak orang yang percaya akan hal itu. Sebab, para pengelolanya, juga berita-beritanya, tidak lagi merepresentasikan aspirasi kepentingan Islam.

Merumuskan dan menjabarkan sosok pers Islam, memang sulit. Fenomena lain yang cukup menarik adalah dengan munculnya koran *Republika*. Harian ini resmi terbit 4 Januari 1993, meramaikan khasanah pers nasional. Begitu *Republika* yang didukung oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) ini terbit, terdengar suara-suara dalam masyarakat yang bersumber dari kalangan surat kabar itu sendiri bahwa *Republika* bukan koran ICMI. Ia adalah koran umum dan tidak secara khusus membawakan suara golongan Islam, tetapi tentu di dalamnya tetap tercermin aspirasi Islam.

Harian yang dijanjikan bukan sebagai koran agama itu merupakan harian umum yang berwawasan kebangsaan dengan nafas Islam dan berorientasi bisnis. Sementara, nama *Republika* itu sendiri merupakan nama yang diberikan Presiden Soeharto ketika pengurus ICMI Pusat menghadap penguasa Orde Baru tersebut. Parni Hadi, yang dipercayai menjadi Pemimpin Umum/ Pemimpin Redaksi Harian *Republika* ketika itu, dalam jumpa pers sesuai peresmian gedung/kantor *Republika* di Jakarta menandatangani, "*Republika* diterbitkan untuk menyalurkan aspirasi sebagian besar masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah". Menurutnya, harian itu juga terbuka untuk dikritik, dan tetap mengkritik penguasa (*Suara Karya*, 4 Januari 1993).

Walaupun ICMI menjadi sponsor utama penerbitan *Republika*, menurut Parni Hadi, harian itu tidak akan menjadi corong ICMI maupun corong Pemerintah. *Republika* akan dikelola

berdasarkan semangat profesional dan bukan semata-mata berdasarkan ikatan primordial. Menurutnya, "Meskipun koran ini bernafaskan Islam, kami sama sekali tidak akan mengaitkannya dengan unsur primordial keislaman, tapi mengandalkannya kepada unsur profesional dari para pengelolanya serta *market force* (kekuatan pasar)" (*Pelita*, 4 Januari 1993). Berbicara soal ciri khas *Republika*, Parni Hadi mengatakan, koran itu akan selalu berusaha tampil khas dalam pemilihan topik. Setelah melakukan *marketing research* dan *reader research*, *Republika* dalam penerbitan perdananya terbit dengan tiras 100.000 dengan konsentrasi awal wilayah Jabotabek dan Jawa Barat.

Jika kemudian misi *Republika* diletakkan dalam Islam kosmopolitan, seperti yang diungkapkan Haidar Bagir (Latif dan Subandy, 1993), maka dua kemungkinan segera menghadang di depannya. Semakin menambah jumlah pembuktian tidak kredibelnya media massa Islam, atau menegasikan semua stereotip minor yang dialamatkan kepadanya.

Seorang ekonom, seperti dikutip tim peneliti "Pers Islam dan Negara Orde Baru" yang dikoordinir Donni Edwin (dalam *Republika*, 26 April 2000), pernah mengkritik cara kelahiran *Republika*. Sebagai lembaga ekonomi, menurut ekonom itu, kelahiran dan cara membesarkan *Republika* termasuk tidak wajar karena ada campur tangan negara (dalam pandangan tim peneliti, dari substansi kritiknya ini, sudah tentu dia seorang ekonom liberal yang sangat mengagungkan hukum pasar). Tetapi, ekonom tersebut, menurut Edwin dan kawan-kawan, tentu lupa melihat dari latar belakang ekonomi-politik koran ini sebagai lembaga ekonomi, sebagaimana halnya koperasi unit desa atau koperasi produsen batik tradisional di Indonesia pada masa Orde Baru.

Keberhasilan *Republika* mengisi kekosongan yang ditinggalkan media-media massa Islam sebelumnya disusul dengan kelahiran majalah *Ummat* di awal tahun 1995. Semangat pendiri *Ummat* ini sebetulnya hampir sama dengan semangat para pendiri *Republika*. Majalah *Ummat* lahir dari kebutuhan untuk melayani masyarakat

Islam yang sadar politik karena pada waktu itu tidak ada majalah yang mengisi segmen tersebut. Tetapi, karena jarak kelahirannya yang berbeda empat tahun dari koran *Republika*, dan selama kurun waktu tersebut juga telah terjadi perkembangan politik yang tidak lagi persis sama dengan ketika *Republika* dilahirkan, *Ummat* terbit secara lebih independen dan dengan semangat kewiraswastaan, meskipun dari segi perhitungan yang terakhir ini *Ummat* gagal hingga berhenti terbit di saat reformasi politik baru dimulai tahun 1998.

Walaupun majalah ini akhirnya gagal karena resistensi pasar iklan, lonjakan prestasinya meraih pembaca patut dicatat. Dalam tempo usia kurang lebih satu tahun, menurut data *Survey Research Indonesia*, majalah ini telah berada di peringkat 3-4 dari segi jumlah pembaca di antara majalah-majalah berita umum. Prestasi ini tentu juga menarik jika dilihat dari segi modal SDM-nya yang sekitar 95 persennya adalah orang-orang yang memulai karier wartawan dari nol (Edwin, *et al.*, 2000).

Masyarakat Indonesia secara keseluruhan tidak/belum akan menjadi masyarakat informasi secepat negara maju di awal abad ke-21 ini. Namun, sebagian masyarakat pada segmen tertentu merupakan bagian dari masyarakat industri global, dengan kemajuan ekonomi jumlah golongan ini akan memadai untuk menunjang beberapa penerbitan *on line*, misalnya.

Namun, seiring dengan kian merambahnya globalisasi informasi dan komunikasi, tampaknya terasa getir melihat lembaga pers Islam di Indonesia dewasa ini. Apalagi bila melihat perubahan-perubahan global yang dapat mengubah sama sekali gaya hidup (*life style*) masyarakat Islam.

Hampir seluruh sudut dan pelosok hunian umat Islam kini tampak berubah, sehingga dengan cepat masyarakat Islam menjadi masyarakat "*laa diniyah*", yang membiarkan hidup mereka dalam dekapan sekularisme. Sendi-sendi dasar masyarakat Islam, yaitu "keluarga", telah dihancurkan melalui media massa, termasuk lembaga pers yang ada, baik melalui jaringan pemberitaan mereka maupun gambar-gambar yang mereka muat.

Di tengah-tengah suasana seperti ini, pers

Islam bagai tak bisa berkutik dalam menghadapi era informasi, yang sesungguhnya merupakan "invasi" kebudayaan yang dilakukan Barat terhadap dunia Islam. Masihkah pers Islam mempunyai harapan untuk berkembang? Bagaimana sesungguhnya wajah pers Islam kita sekarang?

Yang jelas, seperti dikatakan Abdelwahab el-Affendy (1993), sepanjang 1970-an dan 1980-an, nalar kritis di Dunia Islam telah terpasung. Ini, antara lain, karena dibungkamnya media-media massa yang kritis. Dorongan ke arah perdebatan bebas, pupus. Dalam pandangan el-Affendy, para penguasa otoriter di dunia Islam berupaya mempertahankan monopoli media di negeri sendiri dan mengkooptasi pers luar negeri sebagai bagian dari usaha sinis mempertahankan kekuasaan.

Pandangan bahwa media di Dunia Muslim tidak berjalan sesuai dengan harapan-harapan memang sudah umum dikemukakan. Namun, yang biasanya dipandang biang keladinya (culprit) adalah hegemoni Barat, terutama Amerika Serikat, dalam bidang komunikasi internasional. Masalah tersebut menjadi tema perdebatan-perdebatan intensif pada 1970-an dan 1980-an, khususnya dalam UNESCO (*United Nations, Social and Cultural Organization*), di mana kampanye sengit atas nama NWICO (*New World Information and Communication*) akhirnya gagal.

Berbagai Pandangan tentang Pers Islam

Apakah yang disebut sebagai pers Islam itu? Haruskah ia memuat dan berisi ayat-ayat suci Al-Qur'an dan Hadits Nabi? Adakah ia semacam surat kabar, tabloid, atau majalah yang menulis nasihat dan fatwa para ulama? Apakah yang disebut pers Islam itu pers yang memuat gambar dan wawancara para kiai di pondok-pondok pesantren serta hanya memberitakan segala aktivitas umat Islam saja, terutama yang baik-baik? Ataukah pers Islam itu yang mungkin tanpa atau sedikit ayat namun sarat informasi yang bermanfaat bagi umat?

Para pakar komunikasi, akademisi jurnalistik, dan praktisi pers, sudah sejak lama mencoba

memberikan rumusan, pengertian, batasan, definisi, atau formulasi tentang pers Islam ini berdasarkan masing-masing sudut pandang dan persepsi. Zaim Uchrowi, misalnya, menyebutkan secara garis besar pers Islam terpecah menjadi dua pandangan. Pandangan *pertama* adalah pers yang menyatakan dirinya Islam dan menggunakan atribut-atribut formal Islam. “Soal apakah isi keredaksian maupun manajemen tidak menjalankan prinsip-prinsip Islam, adalah soal lain,” katanya. Yang *kedua*, berpandangan bahwa yang terpenting adalah berkembangnya nilai-nilai Islam. Bukan berkibarnya bendera. Pandangan kedua ini melihat bahwa Islam adalah universal. Artinya, nilai-nilai Islam pasti membawa kebaikan bila dilaksanakan dalam kehidupan. Oleh siapa pun, “Walaupun oleh mereka yang nonmuslim.” Maka, kata Zaim, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kebenaran, menjadi landasan utamanya (Muhammad, 1992).

Sementara itu, “Muktamar Media Massa Islam Sedunia I,” yang berlangsung di Jakarta, tanggal 1 sampai 3 September 1980, telah berusaha pula merumuskan kriteria pers Islam. Disebutkan bahwa yang disebut pers Islam ialah segala liputan dan tulisan lainnya yang senantiasa mendasarkan pemberitaannya atas kebenaran Islam dengan cara dan metode yang diatur agama Islam, yakni *bi al-mau’izhah al-hasanah* (pendekatan yang baik), sehingga memungkinkan terjalannya pengertian pembaca terhadap Islam. Dengan kata lain, pers Islam itu harus selaras dengan tuntutan Islam itu sendiri. Bukan sebaliknya, pers Islam di luar metode dan aturan agama Islam. Dalam pemahaman yang lebih dalam, pers Islam itu bersifat universal. Tegaknya nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan hak-hak asasi, kepedulian sosial, dan seterusnya, adalah kongkruen dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Baharun, 1996; Badan Litbang Penerangan, 1981).

Secara sederhana, tim survei “Pers Islam dan Negara Orde Baru”, seperti dikutip *Republika* (26 April 2000), merumuskan pengertian pers Islam sebagai “pers yang dalam kegiatan jurnalistiknya melayani kepentingan umat Islam, baik yang berupa materi (misalnya kepentingan politik) maupun nilai-nilai.”

Dalam pandangan Ainur Rofiq Sophiaan, ada dua metode pendekatan yang sederhana dalam menyelidik pers Islam. *Pertama*, metode pendekatan secara formal. Dengan pendekatan ini pers Islam dipahami sebagai pers yang diterbitkan oleh umat Islam, menyuarakan aspirasi dan aktivitas umat Islam dan bertujuan untuk mempertahankan misi dan eksistensi Islam. *Kedua*, metode pendekatan informal. Dari kacamata ini pers Islam dinilai dari misi Islam itu sendiri secara global dan holistik; *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi semesta alam). Dalam konteks ini, Islam lebih banyak diukur dari cita-cita moralitasnya dari semua segi kehidupan. Wujudnya adalah keadilan, pemerataan, “kebebasan” (tidak seperti lazimnya di Barat), persaudaraan, persamaan, dan demokrasi (Sophiaan, 1993).

Jika itu yang menjadi titik acuannya, muncul pertanyaan, bukankah hampir semua media menyanggah komitmen seperti itu? Memang benar demikian adanya. Pers Islam dari sudut pandang ini masih perlu diperjelas lagi, yaitu bahwa penerbitan itu dikelola dan dimiliki oleh orang-orang Islam dan secara sadar, meskipun tidak formal, untuk menjembatani kepentingan umat.

Jika dari berbagai pandangan tersebut dirumuskan, maka pers Islam adalah, pers yang dari segi kepemilikan (*ownership*), pemegang saham terbesarnya adalah orang/kelembagaan Islam, atau setidaknya mempunyai *ghirah* dan atau *commitment* terhadap nilai Islam, sebagian atau seluruhnya.” Indikator pers Islam pada dasarnya tidak terletak pada awak jurnalistiknya yang Muslim. Sebuah penerbitan pers dapat saja mempekerjakan jurnalis Muslim dalam jumlah mayoritas, namun kepemilikan modalnya berada pada orang/kelembagaan yang berada di luar kriteria tersebut di atas.

Sebenarnya, ilmu komunikasi tidak mengenal istilah wajah pers secara baku. Jika ingin gampang, “wajah” itu dapat saja digambarkan menurut penampilan fisik. Dapat juga orientasi redaksi ataupun isi yang disajikan oleh pers yang sedang ditelaah. Mungkin pula kesan masyarakat umum mengenai pers yang bersangkutan; misalnya

stereotip (*stereotype*) yang dilekatkan padanya. Namun, untuk menggambarkan suatu pers, yang biasa dilakukan adalah menelaah unsur-unsur pokoknya, kemudian mencari “benang merah” yang mengikatnya menjadi satu.

Pers masa kini adalah institusi yang bermukanya ganda (Dahlan, 1991). Wajah yang *pertama* adalah sebagai usaha, institusi industri atau ekonomi. Wajah yang *kedua*, sebagai institusi redaksional atau lembaga jurnalistik. Dan, yang *ketiga*, sebagai pemasok kebutuhan informasi khalayak atau institusi kemasyarakatan. Untuk menggambarkan wajah pers Islam atau pers yang Islami, berarti melukiskan ketiga aspek ini bersama-sama, baik aspek ekonomi, informasi, maupun profil khalayak. Kemudian, perlu dicari “benang merah” yang menjadikannya pers Islami, bukannya pers non-Islam atau pers yang lain. Itu berarti pula bahwa pembahasan pers Islam tidak dapat melepaskan diri dari pers nasional Indonesia secara umum.

Peranan Pers Islam dalam Demokratisasi di Indonesia

Apa itu demokratisasi? Secara harfiah, “demokratisasi” dapat diartikan sebagai “proses untuk mencapai demokrasi”. Karena itu, pembicaraan ihwal demokratisasi selalu membutuhkan klarifikasi terlebih dahulu mengenai makna dan substansi kata “demokrasi”. Secara sederhana, demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan dengan segenap kegiatan yang dikelolanya dijalankan dengan menjadikan rakyat sebagai subjek atau titik tumpu. Demokrasi merupakan sistem yang bertumpu pada daulat rakyat, bukan daulat pemimpin, daulat negara/pemerintah, atau daulat raja.

Pelbagai literatur ilmu politik modern (Barat) biasanya menyebut beberapa ciri pokok sebuah sistem yang demokratis. Di antaranya: (1) partisipasi politik yang luas; (2) kompetisi politik yang sehat; (3) sirkulasi kekuasaan yang terjaga, terkelola, dan berkala, terutama melalui proses pemilihan umum; (4) pengawasan terhadap kekuasaan yang efektif; (5) diakuinya kehendak

mayoritas; dan (6) adanya tatakrama politik yang disepakati dalam masyarakat (Fatah, 2000).

Bagaimana sebuah sistem itu berjalan secara demokratis? Secara umum, sistem yang demokratis pada hakikatnya ditandai oleh berjalannya tiga prinsip dasar. *Pertama* tegaknya etika dan moralitas politik sebagai landasan kerja sistem politik, ekonomi, dan sosial. *Kedua*, tegaknya prinsip konstitusionalisme, yakni tegaknya supremasi hukum dan adanya kepatuhan pada hukum dalam masyarakat. *Ketiga*, digunakannya mekanisme akuntabilitas atau pertanggungjawaban publik, yakni mekanisme yang memosisikan semua pemegang jabatan publik sebagai pemegang mandat atau amanat dari rakyat.

Ada yang mengartikan demokrasi itu sebagai teori tentang kekuasaan. Ada pula yang melihat kaidah-kaidah demokrasi sebagai teori tentang hak. Kuntowijoyo (1997) menyebut tiga substansi hak-hak asasi dalam masyarakat demokratis, yakni (1) hak politik (demokrasi politik mengenai hubungan negara dengan masyarakat); (2) hak sipil (demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi, mengenai hubungan elite dengan massa); dan (3) hak aktualisasi diri (demokrasi budaya dan demokrasi agama, mengenai hubungan negara dengan warga negara, serta hubungan antarwarga negara).

Dalam perspektif Islam, demokrasi itu tercakup dalam kaidah-kaidah: (1) *ta'arruf* (saling mengenal), (2) *syura* (musyawarah), (3) *ta'awun* (kerjasama, koperasi), (4) *mashlahah* (menguntungkan masyarakat), dan (5) *'adl* (adil).

Pada dasarnya, *ta'arruf* hanya berjalan kalau ada *equality*, persamaan. Tidak ada warga negara yang dinomorduakan. *Ta'arruf* mempunyai asumsi adanya *liberty*, kemerdekaan. *Ta'arruf* juga berarti adanya komunikasi dialogis. Tidak ada dominasi satu kelompok atas kelompok lain.

Syura atau musyawarah diwajibkan dalam Islam. Karena itu, bagi umat Islam, komitmennya pada demokrasi tidak diragukan lagi. Praktik menunjukkan, betapa Nabi sendiri menghargai musyawarah. Misalnya, menjelang Perang Uhud antara pihak Nabi di Madinah dan kaum Quraisy di Makkah, ada dua kemungkinan yang dihadapi: bertahan dalam kota Madinah atau berperang di

luar kota. Nabi mengadakan musyawarah dengan kaum Muslim untuk menentukan pilihan. Nabi kemudian mengalah pada kehendak mayoritas.

Dalam *ta'awun* atau kerjasama, ada dua kepentingan yang diharuskan untuk bekerja sama, yaitu kepentingan manusia dan "kepentingan" Tuhan. Biasanya orang berbicara tentang demokrasi dalam pengertian demokrasi politik, yaitu tidak adanya hambatan dari kekuasaan. Demokrasi yang dimaksud secara negatif, berarti "merdeka dari". Islam menginginkan pengertian yang lebih dari itu, demokrasi perlu diperluas menjadi kerjasama antarwarga, "merdeka untuk", yaitu demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi.

Mashlahah sama akarnya dengan kata shalih yang berarti "baik" menurut agama. Dalam Al-Qur'an banyak dijumpai kata shalih dan kata jadinya. *Shalih* atau saleh dapat berarti kebaikan pada umumnya, menguntungkan di sinilah orang sering berbicara agama sebagai *moral force* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

'*Adl* atau adil. Kebutuhan berlaku adil banyak kita jumpai dalam Al-Qur'an. Dalam Surah An-Nisa' (4):8, misalnya, disebutkan, "*Apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil.*" Surah Al-An'am (6): 152, juga menandakan "*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu.*"

Lantas, bagaimana peranan pers, khususnya pers Islam, dalam proses demokratisasi itu? Jika saja para insan pers Islam memahami makna demokratisasi, memahami ciri pokok sebuah sistem demokratis, bisa menjiwai kaidah-kaidah demokrasi, dan utamanya memiliki tekad serta kemauan yang kuat untuk mengaplikasikannya dalam manajemen penerbitan pers dan praktik jurnalistik mereka, saya kira reputasi dan kredibilitas penerbitan pers Islam akan memiliki peran yang menentukan dalam proses demokratisasi di Indonesia ini.

Bagaimanapun, demokrasi itu bukanlah sistem yang mudah dan murah. Salah satu sebabnya, demokrasi merupakan sistem yang dipenuhi oleh banyak paradoks (dua hal bertentangan yang mesti diwujudkan dalam waktu

yang bersamaan). Beberapa paradoks yang ada dalam demokrasi adalah: (1) kebebasan dan keteraturan atau keleluasaan dan kontrol; (2) kompetisi dan persamaan; (3) pengawasan yang efektif dan pemerintahan yang kuat; (4) dinamika dan stabilitas; serta (5) kesejahteraan dan keadilan.

Akhirnya, oleh karena demokrasi merupakan sesuatu yang tidak mudah dan tidak murah, proses demokratisasi, tentu saja, selalu membutuhkan waktu dan biaya. Setiap negara mengalami proses demokratisasi dalam rentang waktu yang berbeda-beda. **M**

Catatan:

Tulisan ini pernah disampaikan pada Seminar "Peran Media Islam dalam Demokratisasi di Indonesia" yang diselenggarakan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LkiS), Yogyakarta, di Kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), 7 Oktober 2004.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Assegaff, Dja'far H. 1993. *Islam dan Tantangan Abad Informasi: Tebaran Tulisan tentang Pers dan Dakwah dalam Era Globalisasi Informasi*. Jakarta: Media Sejahtera.
- Badan Litbang Penerangan. 1981. *Almanak Pers Indonesia 1981*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- Baharun, M. 1996. *Opini Keislaman Aktual*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.
- Effendy, Bahtiar. 2002. "Islam, Demokrasi, dan Modal Sosial". Pengantar dalam Mun'im A. Sirry. *Dilema Islam Dilema Demokrasi*. Bekasi: PT Gugus Press. Hlm. Xiii-xxiii.
- Fatah, Eep Saefulloh. 2000. *Zaman Kesempatan; Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Hamka, Rusjdi. 1989. "Kepeloporan Pers Islam dan 30 Tahun Panji Masyarakat," dalam Hamka, Rusjdi dan Rafiq (ed.). *Islam dan Era*

- Informasi*. Jakarta: Pustaka Panjimas, hlm. 229-248.
- Hanazaki, Yasuo. 1998. *Pers Terjebak*. Penerjemah Danang Kukuh Wardoyo dan Tim Cipinang. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Junaedhie, Kurniawan. 1995. *Rahasia Dapur Majalah di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Lesmana, Tjipta. 1995. *Pornografi dalam Media Massa*. Jakarta: Puspa Swara.
- Maulani, Z.A. 2003. *Zionisme: Gerakan Menaklukkan Dunia*. Jakarta: Pustaka Amanah.
- Mulyana, Deddy. 2000. *Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1991. *Islam Aktual; Refleksi-Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan.
- Rasyid, Daud. "Membentengi Islam dari Berbagai Distorsi Pemikiran." Pengantar dalam Adian Husaini. *Penyesatan Opini*. Jakarta: Gema Insani Press. Hlm vii-xii.
- Said, Edward W. 1981. *Covering Islam, How the Media and the Expert Determine How We See the Rest of the World*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Said, Tribuana. 1988. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sardar, Ziauddin. 1988. *Tantangan Dunia Islam Abad 21: Menjangkau Informasi*. Penerjemah A.E. Priyono dan Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Sirry, Mun'im A. 2002. *Dilema Islam Dilema Demokrasi*. Bekasi PT Gugus Press.
- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Sophiaan, Ainur Rofiq. 1993. *Tantangan Media Informasi Islam: Antara Profesionalisme & Dominasi Zionis*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Sudibyo, Hamad, Qodari. 2001. *Kabar-Kabar Kebencian: Prasangka Agama di Media Massa*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi (ISAI).
- Susanto, AB. 2001. *Potret-Potret Gaya Hidup Metropolitan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

B. Jurnal, Surat Kabar, dan Majalah

- Abdullah, Aslam. 1988. "Menuju Pembangunan Pers Islam." Penerjemah Deddy Mulyana. Bandung: Lembaran Jum'atan *Salam*, No.14/5-11 Pebruari 1988. Hlm14.
- _____. 1987. "Focus on the Muslim Media". *Islamic World Review*: Vol.6, No.68, April 1987.
- Anwar, H. Rosihan. 1993. "Pers Islam Indonesia, Mampukah Bangkit?". Bandung: *Hikmah*, 9 Februari 1993. Hlm. 4.
- Assegaff, Dja'far. 1992. "Pers Islam dalam Dinamika Pers Nasional: Sebuah Tinjauan dari Segi Profesionalisme Jurnalistik." Jakarta: *Reporter* 24/V/Des. 1992-Januari 1993. Hlm. 4-5.
- Edwin, Donni, et. al. 2000. "Pers Islam dan Negara Orde Baru." Jakarta: *Republika*, 26 April 2000. Hlm. 19.
- _____. 2000. "Pers Islam: Di Antara Aspirasi Politik dan Modal". Jakarta: *Republika*, 26 April 2000. Hlm.20.
- El-Affendy, Abdelwahab. 1993. "The Eclipse of Reason: Media in The Muslim World." Dalam *Journal of International Affairs* 47:1 (Summer 1993).
- Hamka, Rusjdi. 1989. "Membidik Pangsa Pasar Media Islam". *Reporter* No.3/Tahun I/Juni-Juli 1989. Hlm. 21-23.
- Hamzah, Nusyirwan. 1992. "Pengaruh Keterlibatan dalam Kegiatan Profesi terhadap Profesionalisme: Studi di Kalangan Dokter". *Jurnal Sosiologi Masyarakat* No.1. Jakarta:

-
- Jurusan Sosiologi FISIP UI & PT Gramedia
Pustaka Utama.
- Kompas*. 2004. "Selamat Pak SBY, Terima Kasih Bu Megawati." Tajuk Rencana. 5 Oktober 2004. Hlm. 4.
- _____. 2004. "Dunia Sambut Baik Yudhoyono." 6 Oktober 2004. Hlm. 1
- Latif, Y. dan Idi Subandi. 1993. "Republika dan Wajah Pers Kita." Jakarta: *Republika*, 7 Februari 1993. Hlm.3.
- Muhammad, Agus. 2001. "Jihad Lewat Tulisan". *Pantau*, Kajian Media dan Jurnalisme. Juli 2001. Hlm 11-16.
- Mulyana, Deddy. 2000. "Aneh, Umat Islam Indonesia..." Bandung: *Hikmah*, 1 Pebruari 2000. Hlm. 5.
- Panji Masyarakat*. 1986. "Majalah Al Munir Media Dakwah Kaum Muda". Jakarta. No. 493, 1 Februari 1986. Hlm. 9-11.
- Pelita*. 1993. "Selamat Datang Republika". Jakarta. 5 Januari 1993. Hlm.1.
- Pikiran Rakyat*. 2004. "George Bush Puji SBY." 6 Oktober 2004. Hlm. 1.
- Samantho, Ahmad Y. 2002. *Jurnalistik Islami*. Bandung: Harakah.
- Suara Karya*. 1993. "Republika Berjanji Kritik Penguasa". Jakarta. 4 Januari 1993. Hlm.1
- Usep, H. 2000. "Media Massa Islam: Antara Kebutuhan dan Ketakpedulian." Bandung: *Hikmah*, 1 Pebruari 2000. Hlm.5

C. Makalah

- Azra, Azyumardi. 1994. "Pers Islam: Peluang dan Tantangan." Makalah. Disampaikan pada Saresehan Milad I Tabloid Mingguan *Hikmah*. Bandung, 3 Pebruari 1994.
- Dahlan, M. Alwi. 1991. "Wajah Pers Islam Masa Kini". Makalah. Disampaikan pada Seminar Kontribusi Cendekiawan Muslim bagi Pengembangan Pers yang Islami, 16-17 Maret 1991. Bandung: Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung (Fikom Unisba).

